

# **LEGAL MEMORANDUM ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TRENGGALEK NO: 08/Pdt.G/2012/PN.TL**

**(dalam perkara wanprestasi)**

Raditama Anindya Kreshna, Ulfa Azizah,SH.,M.Kn, Rachmi Sulistyarini,SH.,MH

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : [xxx.dito@yahoo.com](mailto:xxx.dito@yahoo.com)

## **ABSTRAK**

Artikel Ilmiah ini menganalisis dan membahas tentang Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Trenggalek No: 08/Pdt.G/2012/PN.TL (dalam perkara wanprestasi). Dalam putusan tersebut hakim menghukum Ir.Suprpto dan SDA untuk bertanggung jawab memenuhi kekurangan pembayaran. Perkara tersebut bermula dari perjanjian kerjasama pembangunan jalan akses angkut dan pemasangan pipa antara Ir. Suprpto selaku direktur PDAM dengan PT Manggala telah memenuhi syarat sahnya sesuai dengan pasal 1320BW. Perjanjian kerjasama tersebut dibiayai oleh PDAM Trenggalek, Bupati Trenggalek melalui DAMPING APBD II dan pihak SDA. Wanprestasi perjanjian kerjasama pembangunan dan pemasangan pipa tersebut terjadi dalam bentuk terlambat berprestasi, karena Pihak SDA dan Bupati tidak melunasi sisa pembayaran, Dalam perjanjian tersebut tidak dicantumkan dengan jelas upaya penyelesaian jika terjadi wanprestasi. Dari penelitian diatas penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa para pihak yang tidak melakukan prestasi harus melakukan pelunasan pembayaran dengan cara tanggung renteng kepada PT Manggala.

Kata Kunci : Putusan Pengadilan, Wanprestasi, PDAM, SDA,DAMPING APBD II

**LEGAL MEMORANDUM OF JUDICIAL ANALYSIS  
TOWARDS TRENGGALEK STATE COURT VERDICT**

**NO : 08/Pdt.G/2012/PN.TL**

**(in case of contract breaching)**

**Law Faculty of Brawijaya University**

Email : [xxx.dito@yahoo.com](mailto:xxx.dito@yahoo.com)

**ABSTRACT**

This paper analyses and discusses about judicial analysis of Trenggalek state court verdict no : 08/Pdt.G/2012/PN.TL (in case of contract breaching). In that verdict the judge condemned Ir. Suprpto and SDA to be responsible in fullfiling the deficient payment. The case started from the cooperation contract of transportation access road and pipe installment between Ir. Suprpto as the director of PDAM with PT Manggala had authorized the requirements according to section 1320 BW. The contract was funded by PDAM Trenggalek, the Regent of Trenggalek through DAMPING APBD II and SDA representation. The contract of development and pipe installation happened in the form of late payment for the SDA representation and the regent could not settle the remaining payment. In the contract was not mentioned a clear solution in case there will be a breach of contract. From the previus research, the researcher obtained answer of the existing problems, that both parties must settle the payment by cooperating towards PT. Manggala.

**Keywords :** Court verdict, breach of contract, PDAM, SDA, DAMPING APBD II

## **A. Kepala Legal Memo (Heading)**

Kepada :Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya

Dari : Raditama Anindya Kreshna, Mahasiswa Fakultas  
Hukum Brawijaya

Pokok Masalah :Analisis Yuridis Putusan Pengadilan

Negeri Trenggalek Nomor : 08 / Pdt.G/2012/ PN.TL

Dalam Perkara : Wanprestasi

Pihak – Pihak yang Berselisih :

1. SUMALI,sebagai PENGGUGAT I
2. NIMAJ ANGGI CHRIS VALLIANDRA,sebagai PENGGUGAT II
3. SUMADJI,sebagai PENGGUGAT III

MELAWAN :

1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, PEMERINTAH DAERAH TRENGGALEK cq PERUSAHAAN AIR MINUM (PDAM), sebagai TERGUGAT I
2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM di JAKARTA cq SNVT PELAKSANA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR BRANTAS BBWS, sebagai TERGUGAT II
3. PEMERINTAH RI cq MENDAGRI cq PEMPROP cq BUPATI TRENGGALEK, sebagai TERGUGAT III
4. Ir. SUPRAPTO,MM, sebagai TERGUGAT IV

5. PEMERINTAH RI cq DEOARTEMEN PEKERJAAN UMUM  
DIREKTORAT JENDRAL CIPTA KARYA cq SATUAN KERJA  
PENGEMBANGAN PENGELOLAAN AIR MINUM JAWA TIMUR ,  
sebagai TURUT TERGUGAT I
6. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
TRENGGALEK, sebagai TURUT TERGUGAT II

Obyek Sengketa : WANPRESTASI

Tanggal : 14 April 2014

**B. Permasalahan Hukum (Legal Issues)**

1. Apakah Ir. Suprpto dalam perjanjian kerjasama pembangunan jalan akses angkut dan pasang pipa No. 690/20/406.080/2007 No. 43/MGL/TG/I/08 antara PT. Manggala dengan Para Tergugat telah wanprestasi ?
2. Apakah tepat Putusan Pengadilan No. 08/pdt.G/2012/PN.TL yang menghukum Ir. Suprpto dan SDA bertanggung jawab memenuhi kekurangan pembayaran terhadap PT. Manggala ?

**C. Jawaban Singkat (Brief Answer)**

1. Ya, karena perjanjian pembuatan akses jalan dan pemasangan pipa angkut dan pasang pipa No. 690/20/406.080/2007 No. 43/MGL/TG/I/08 tidak dibayar sampai dengan jatuh tempo yang sudah ditentukan.
2. Tidak tepat, karena para Tergugat bertanggung jawab dengan cara membayar secara tanggung renteng pada PT. Manggala.

#### **D. Pernyataan Fakta (Statement of Facts)**

1. Bahwa PT. Manggala mendapatkan undangan pengadaan barang dan jasa lain oleh ketua panitia pengadaan barang dan jasa pemborongan dan jasa lain dilingkungan satuan kerja pengembangan kinerja air Jawa Timur.
2. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2007, telah ditandatangani surat perjanjian tentang penawaran pelelangan pemas, pipa GI dia 300, PVC 200, pengadaan dan pemas, aksesoris, pembangunan bending dan intake, prasedimentasi 100L/detik, slow sand filter 100L/dtkdan BPT.
3. Bahwa tanggal 10 Mei 2007, telah keluar SURAT PERINTAH KERJA No: KU.08.09-Ca.13.06/29/KA-01/2007 dari Departement PU (Satuan Kerja Pembangunan Kinerja Pengelolaan Air Jawa Timur) kepada PT. Manggala.
4. Bahwa PT. Manggala akan mengundurkan diri karena tidak ada akses jalan tetapi Pemerintah Kabupaten Trenggalek dan masyarakat Trenggalek sangat membutuhkan penyedia air bersih.
5. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2007, telah dibuat kerjasama pembangunan jalan akses angkut dan pasang pipa No. 690/20/406.080/2007 No. 43/MGL/TG/I/08 antara PDAM Trenggalek dengan PT. Manggala.
6. Bahwa dalam perjanjian tersebut PDAM diwakili oleh Ir. Suprpto yang berkapasitas sebagai Direktur dan PT. Manggala diwakili oleh Sumali.
7. Bahwa pada mulanya proyek ini dibuat untuk membuat akses jalan dalam pemasangan pipa, pembuatan bendung dan intake, slow sand filter dan BPT yang terletak di kabupaten Trenggalek, dan masyarakat Trenggalek sangat membutuhkan penyediaan air bersih (kepentingan PDAM).
8. Bahwa PT. Manggala membuat rencana anggaran biaya sebesar Rp 1.270.995.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah).
9. Bahwa PDAM telah melakukan pembayaran biaya jalan akses 2,5m sisi dalam sepanjang ±9000m sebesar Rp 754.600.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Empat JutaEnam Ratus RibuRupiah).
10. Bahwa pembayaran tersebut diangsur sebanyak tiga kali dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tanggal 25 Januari 2008 sebesar Rp 550.00.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
  - b. Tanggal 29 Mei 2008 sebesar Rp 100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah);
  - c. Tanggal 31 Juli 2008 sebesar Rp 104.600.000,-(Seratus Juta Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
11. Bahwa masih ada kekurangan yang belum dibayar kepada PT. Manggala sebesar Rp 516.395.000,-(Lima Ratus Enam Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah).Bahwa sudah dilakukan penagihan kepada pihak Bupati, namun pihak Bupati menyarankan agar pihak Manggala mengajukan gugatan ke Pengadilan dan apabila putusan hakim menyatakan bahwa pihak Bupati terbukti wanprestasi dan atas putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka pihak Bupati bersedia melakukan pembayaran, yang selanjutnya akan dilimpahkan juga pada pihak SDA karena pihak SDA juga ikut memasang pipa di jalan yang sama.
12. Bahwa kekurangan pembayaran tersebut adalah tanggung jawab dari Bupati dan SDA.
13. Bahwa selanjutnya atas kekurangan pembayaran tersebut disebut sebagai obyek sengketa.
14. Bahwa Ir. Suprpto menjabat sebagai Direktur di PDAM dengan periode jabatan Januari 2002 – Januari 2012.
15. Bahwa para Tergugat mengakui Ir. Suprpto sedang melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Direktur PDAM.
16. Bahwa pada saat membuat perjanjian dengan Para Penggugat bahwa menurut bukti obyek sengketa dan juga berdasarkan keterangan saksi, bahwa perjanjian akses pembuatan jalan tersebut dibuat oleh PT. Manggala dan PDAM yang diwakili oleh Ir. Suprpto.
17. Bahwa dalam pembuatan perjanjian akses jalan tersebut terdapat kejanggalan – kejanggalan sebagai berikut :
  - a. Bahwa untuk kekurangan pembayaran akses jalan tersebut dibebankan dan ditanggung bersama PDAM dan pihak SDA;
  - b. Bahwa perjanjian tersebut dibuat tanpa surat kuasa dari Bupati Trenggalek, akan tetapi Bupati telah membuat surat rekomendasi yang ditujukan pada

SEKDA dengan catatan ACC, pembuatan jalan ditanggung bersama oleh pihak SDA dan penyertaan APBD II;

18. Bahwa dari kejanggalan – kejanggalan tersebut jelas bahwa pihak SDA tidak terlibat dalam perjanjian tersebut tetapi ikut memanfaatkan akses jalan yang telah dibuat. Faktanya, disebelah pipa PDAM tertanam pipa SDA untuk irigasi dan tidak ada bukti pembayaran SDA untuk penanaman pipa SDA.
19. Bahwa dalam gugatannya, PT. Manggala mengajukan bukti-bukti tertulis dan juga tiga orang saksi.



## E. ANALISIS ( *Analysis* )

1. Hakim dalam memberikan pertimbangan hukumnya sudah seharusnya memberikan pertimbangan hukum yang tepat dengan melihat bagaimana duduk perkaranya. Hal-hal lain yang harus diperhatikan dalam memberikan pertimbangan hukum adalah dengan melihat peraturan hukum yang berlaku dan memperhatikan keterangan saksi serta alat bukti tertulis yang diajukan oleh para pihak dalam perkara *a quo*, sehingga isi dari amar putusan yang dijatuhkan oleh Hakim memberikan rasa keadilan bagi para pihak yang berperkara.

Dasar hukum yang digunakan penulis sebagai bahan untuk menganalisis masalah sebagaimana tersebut diatas adalah :

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Badan Usaha Milik Negara
5. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2539 K/Pdt/1985
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum.
7. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

PDAM sebagai bentuk dari Perusahaan Daerah yang juga merupakan Badan Hukum yang diwakili oleh seorang Direksi berkedudukan dan berkapasitas sebagai kuasa menurut hukum untuk mewakili badan hukum yang bersangkutan, yang oleh karenanya dapat melakukan tindakan-tindakan untuk dan atas nama Perusahaan tanpa kuasa dari Pemerintah daerah yang diperkuat oleh Putusan MA No. 2539 K/Pdt/1985). Oleh karena itu, dalam perkara *a quo*, Ir. Suprpto yang pada saat itu masih menjabat sebagai Direktur PDAM mempunyai kewenangan bertindak untuk dan atas nama Perusahaan, tanpa adanya kuasa dari Bupati Trenggalek. Disamping itu, mengenai tugas dan wewenang seorang Direktur Perusahaan Daerah telah diatur sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang No.5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah yang didalamnya memuat tentang kepengurusan perusahaan daerah.

Sebagaimana Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Air Minum telah diatur ketentuan tentang tugas Direksi dalam mengelola PDAM, diantaranya sebagai berikut:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (business plan/corporateplan) yang disahkan oleh Kepala Daerah melalui usul Dewan Pengawas;
- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (business plan/corporateplan) kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.

Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 huruf a, huruf c dan huruf e, telah jelas menunjukkan bahwa seorang Direksi PDAM mempunyai tugas sehubungan dengan kegiatan Perusahaan sepersetujuan Kepala Daerah yang dalam perkara *a quo* atas rencana pembangunan perpipaan Bayong dengan No.: 690/93/406.080/2007 yang telah mendapat rekomendasi dari Bupati Trenggalek yang ditujukan kepada Sekda dengan catatan ACC, pembuatan jalan ditanggung bersama pihak SDA dan DAMPING penyertaan APBD II, yang karenanya Ir. Suprpto selaku Direktur PDAM tidak melampaui batas kewenangannya sebagai Direktur PDAM. Serta sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 huruf h tentang wewenang seorang Direktur PDAM :

*melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAM* (Pasal 9 huruf h)

Dari pasal diatas menunjukkan bahwa Ir. Suprpto yang pada saat itu menjabat sebagai Direktur PDAM dalam perkara *a quo* mempunyai wewenang untuk menandatangani dan mengikatkan diri dalam perjanjian termasuk perjanjian kerjasama pembangunan jalan akses

angkut dan pasang pipa No. 690/20/406.080/2007 No. 43/MGL/TG/I/08 dengan PT. Manggala

Pada tanggal 12 September 2012 PT. Manggala telah mengajukan surat gugatan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek melawan PDAM dkk sebagaimana Perkara Perdata No. 08/Pdt.G/2012/PN. TL, termasuk Ir Suprpto yang tidak lain berkapasitas sebagai Direktur PDAM Trenggalek. PT. Manggala sebagai pemenang lelang pengadaan barang dan jasa yang diperintah untuk pemasangan pipa, pembuatan bendung dan *intake, slow sand* filter di Kabupaten Trenggalek. Faktanya, pekerjaan tersebut tidak bisa dilaksanakan karena tidak ada akses jalan, sehingga dibuat perjanjian kerjasama pembangunan jalan akses angkut dan pasang pipa, No.: 690/20/406.080/2007, No.: 430/MGL/TGL/I/08, antara PT Manggala dengan PDAM yang diwakili oleh Ir. Suprpto yang berkapasitas sebagai Direktur PDAM Kabupaten Trenggalek. melakukan perjanjian tersebut Ir. Suprpto tidak memerlukan surat kuasa dari Bupati Trenggalek,

Sebagaimana pertimbangan Hakim dalam putusan perkara perdata No. 08/Pdt.G/2012/PN.TL, jika dihubungkan dengan pasal 1792BW yang menyebutkan bahwa pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaannya kepada orang lain yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan, dimana pemberian kuasa menerbitkan perwakilan yaitu adanya seorang yang mewakili orang lain untuk melakukan suatu perbuatan hukum, dan pasal 1793 BW yang menyebutkan cara pemberian kuasa meliputi :

1. diberikan dan diterima melalui
  - a. suatu akta umum
  - b. tulisan dibawah tangan
  - c. sepucuk surat
  - d. secara lisan

Ir. Suprpto melakukan perjanjian pembuatan akses jalan angkut dan pasang pipa No.: 690/20/406.080/2007 No.: 43/MGL/TG/I/08 dengan PT. Manggala merupakan suatu bentuk kuasa yang diberikan secara diam-diam oleh Bupati dilihat dari telah terlaksananya perjanjian pelaksanaan pekerjaan pembuatan jalan tersebut. Berdasarkan pertimbangan diatas, Ir. Suprpto mempunyai wewenang yang sah untuk membuat perjanjian akses jalan tersebut dikarenakan pemberian kuasa yang telah diberikan oleh

Bupati Trenggalek, sehingga perjanjian antara Ir. Suprpto dan PT. Manggala adalah sah secara hukum.

Bahwa fakta dipersidangan, sebagaimana perkara perdata No. 08/Pdt.G/2012/PN.TL, yang mana PT. Manggala sebagai pihak Penggugat telah menggugat Ir. Suprpto secara pribadi sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Selain itu, sebagaimana yang telah disampaikan oleh pihak Tergugat I yaitu PDAM dan pihak Tergugat III yaitu Bupati Kabupaten Trenggalek dalam jawabannya, bahwa Ir. Suprpto dalam menandatangani perjanjian dengan pihak Penggugat dengan mengatasnamakan Pemerintah Kabupaten Trenggalek tanpa adanya kuasa dari Bupati Trenggalek, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Ir. Suprpto menjadi tanggungjawab pribadi dan perjanjian dianggap tidak sah/cacat hukum adalah tidak berdasarkan hukum tidak dapat dibenarkan

Menurut Sudikno Metrokusumo, dalam Buku Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1985, hal. 97, Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasar kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum.

Menurut Subekti, bahwa suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, diatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian, diantaranya:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.

Berdasarkan pengertian dan syarat sahnya suatu perjanjian maka perjanjian kerjasama pembangunan jalan akses angkut dan pasang pipa No.: 690/20/406.080/2007 No.: 43/MGL/TG/I/08 yang ditandatangani oleh Ir. Suprpto yang saat itu berkapasitas sebagai Direktur PDAM dengan PT. Manggala telah terpenuhi dan sah menurut hukum, yaitu:

1. Adanya kesepakatan antara PDAM yang saat itu diwakili oleh Ir. Suprpto selaku Direktur PDAM dengan PT. Manggala.
2. Bahwa Ir. Suprpto berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian kerjasama pembangunan jalan akses angkut dan pasang pipa No.: 690/20/406.080/2007 No.: 43/MGL/TG/I/08 dengan PT. Manggala.
3. Bahwa obyek yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut adalah mengenai pembangunan akses jalan untuk melaksanakan pemasangan pipa di Kabupaten Trenggalek.
4. Bahwa maksud atau tujuan dari pembangunan akses jalan tersebut dilakukan supaya terlaksana pemasangan pipa untuk penyediaan air bersih bagi masyarakat di Kabupaten Trenggalek.

Di dalam hukum perdata, apabila suatu perjanjian yang dibuat oleh debitur dan kreditur telah terpenuhi beberapa syarat yang terdapat pada pasal 1320BW maka perjanjian tersebut dapat dikatakan sah menurut hukum perjanjian akan tetapi dengan yang tidak terpenuhinya kewajiban oleh debitur kepada kreditur maka perjanjian tersebut dapat dikatakan telah wanprestasi. Dalam perkara ini, PT Manggala yang telah melakukan perjanjian pembangunan jalan akses angkut dan pasang pipa No.690/20/406.080/2007 No. 43/MGL/TG/I/08 dengan PDAM yang diwakili oleh Ir. Suprpto adalah sah menurut hukum, tetapi setelah selesainya proyek pembangunan jalan akses dan pemasangan pipa oleh PT Manggala belum dilunasi sisa pembayaran proyek pembangunan oleh para tergugat, biaya yang harus dibayar kepada PT Manggala adalah Rp. 1.270.995.000,- dan biaya yang telah dibayar oleh PDAM adalah sebesar Rp.754.600.000,- sehingga terdapat kekurangan yang belum dibayar sampai saat ini sebesar Rp.516.395.000,-. Sehingga perjanjian yang dibuat oleh PT Manggala dengan PDAM yang diwakli oleh Ir. Suprpto tersebut dapat dinyatakan telah wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak terlaksananya kewajiban debitur kepada kreditur karena sengaja ataupun lalai dalam melakukan perjanjian yang telah disepakati”.

Bentuk-bentuk wanprestasi :

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali

2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat)
3. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan
4. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Akibat hukumnya bagi debitur yang wanprestasi :

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur (ganti rugi)
2. Pembatalan suatu perjanjian
3. Peralihan risiko. Benda yang dijanjikan obyek perjanjian sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab dari debitur
4. Membayar biaya perkara kalau sampai diperkarakan di depan hakim

Maka dalam perkara sengketa wanprestasi, para penggugat ingin mendapatkan sisa pembayaran pembangunan jalan akses angkut dan pasang pipa No.690/20/406.080/2007 No. 43/MGL/TG/I/08 dengan para tergugat. Oleh karena itu, para tergugat harus bertanggung jawab atas kekurangan pembayaran terhadap PT. Menggala dan kekurangan pembayaran terhadap PT. Menggala harus ditanggung renteng oleh para tergugat.

2. Dalam perkara sengketa wanprestasi yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Trenggalek melalui putusan nomor : 08/pdt.G/2012/PN.TL., antara PT. Manggala sebagai penggugat dalam dalil gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Trenggalek untuk :
  1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya
  2. Menetapkan bahwa para tergugat telah melakukan wanprestasi
  3. Menhukum para tergugat untuk membayar sisa nilai pekerjaan yang belum dibayar s/d saat ini dengan rincian sebesar Rp. 516.395.000,- (lima ratus enam belas juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Dan membayar beban biaya bunga dari tahun 2008 s/d tahun 2012 = 4,5 tahun, jadi total (  $17\% \times \text{Rp. } 516.395.000$  )  $\times 4,5 = \text{Rp. } 395.042.175,-$  dibulatkan Rp. 395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah), sehingga yang harus dibayar oleh para tergugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 911.395.000,- (sembilan ratus sebelas juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Yang harus dibayar secara tunai setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap

4. Menghukum para tergugat untuk membayar kerugian karena sakitnya penggugat III disebabkan depresi mental sehingga biaya berobat senilai Rp. 339.654.480,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus lima puluh empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah) harus dibayar secara tanggung renteng oleh para tergugat
5. Menghukum para tergugat untuk membayar keterlambatan para pembayaran pada petitum no.2 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah ) setiap hari
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan pada gedung PDAM yang terletak di Jl. Dr. Sutomo No. 2A Trenggalek dan rumah milik tergugat IV terletak di Perum Trenggalek Indah B 10 Desa Sumberingin, Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek
7. Menghukum Para Tergugat untuk melakukan pengosongan terhadap obyek sita jaminan, bila perlu dengan bantuan alat Negara untuk biasanya dijual secara lelang
8. Menghukum Para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian IMMATERIIL kepada Penggugat sebesar lima milyar rupiah
9. Menghukum Para Turut Tergugat tunduk pada isi putusan
10. Membebankan biaya perkara kepada Para TergugatDilihat dari alat bukti yang disampaikan dan dalam amar putusan Pengadilan Negeri Trenggalek yang menyatakan bahwa tergugat II dan tergugat IV telah melakukan wanprestasi tidaklah tepat karena jika dilihat dari keterkaitan para tergugat dalam perjanjian pembuatan akses jalan angkut dan pasang pipa No.: 690/20/406.080/2007 No.: 43/MGL/TG/I/08 dengan PT. Manggalaterdapat hubungan hukum antara tergugat I, tergugat II, tergugat III, dan tergugat IV.

Dilihat dari Gugatan dan adanya kepentingan dalam hal ini, sudah seharusnya Para penggugat mengajukan alat-alat bukti guna membuktikan kebenaran dalam isi gugatannya, dalam perkara ini para penggugat mengajukan beberapa bukti tertulis yang telah disampaikan oleh para tergugat pada persidangan di Pengadilan Negeri Trenggalek, bukti-bukti yang diajukan.

Dari pertimbangan hakim diatas dapat dilihat bahwa hakim menganggap sah perjanjian yang dibuat antara penggugat dan tergugat I yang diwakili oleh tergugat IV dan menganggap Tergugat IV telah melampaui wewenangnya dengan menerbitkan surat keterangan sisa kekurangan pembayaran dan hakim menganggap tergugat II mengetahui akan perjanjian kerjasama pembuatan akses jalan akan tetapi tidak ikut dalam perjanjian tersebut sehingga dengan dimanfaatkannya jalan yang telah dibuat oleh Penggugat maka Tergugat II harus membayarkan sejumlah kompensasi

Penulis memiliki pandangan tidak sama dengan pertimbangan hakim sehingga Mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat dapat dianalisis sebagai berikut :

1. Hubungan hukum PT. Manggala dengan PDAM yaitu bahwa pada tanggal 25 mei 2007 antara perusahaan daerah air minum (PDAM) Kabupaten Trenggalek dengan PT.Menggala telah melakukan perjanjian kerjasama pembuatan akses jalan angkut dan pasang pipa No.: 690/20/4 06.080/2007 No.: 43/MGL/TG/I/08 sesuai bukti yang diberi tanda P-10 yang diwakili oleh Ir. Suprpto yang pada saat itu menjabat sebagai direktur PDAM Kabupaten Trenggalek. Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No.7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air pasal 1 nomor 26, Pengelola sumber daya air adalah institusi yang diberi wewenang untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya air. Dalam hal ini PDAM selaku perusahaan daerah yang membidangi air bersih membuat perjanjian dengan PT. Manggala untuk membuka akses jalan agar pemasangan pipa air minum bisa terealisasi
2. .PT. Manggala dengan SDA tidak memiliki hubungan hukum karena SDA tidak diikutsertakan dalam perjanjian pembuatan akses jalan angkut dan pasang pipa No.: 690/20/406.080/2007 No.: 43/MGL/TG/I/08 tidak berlaku mengikat terhadap SDA, akan tetapi dengan dimanfaatkannya jalan akses yang dibuat oleh PT. Manggala, SDA ikut serta dalam proyek pemasangan pipa serta sudah mendapat acc dari Bupati Trenggalek melalui SEKDA dalam pembuatan jalan yang ditanggung bersama pihak SDA dan DAMPING penyertaan APBD II. Dan pihak SDA telah memanfaatkan akses jalan yang telah dibuat oleh PT Manggala untuk memasang pipa milik SDA yang tidak dimungkinkan dipasang jika tidak dibuat



akses jalan tersebut, maka sudah seharusnya SDA membayar biaya kompensasi untuk kepentingan pihak SDA tersebut

3. Hubungan hukum PT. Manggala dengan Bupati yaitu bahwa Bupati selaku kepala daerah kabupaten trenggalek mempunyai tanggung jawab untuk mensejahterakan masyarakatnya salah satunya terkait masalah air bersih. Sesuai dengan pasal 5 Undang-undang No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang menyatakan bahwa “Negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih dan produktif.” Dengan hal ini jelas bahwa Bupati Trenggalek berkewajiban untuk melanjutkan perjanjian pembuatan akses jalan angkut dan pasang pipa No.: 690/20/406.080/2007 No.: 43/MGL/TG/I/08 mengingat masyarakat kabupaten trenggalek belum mendapatkan penyediaan air bersih. Apabila proyek tersebut tidak dilanjutkan maka akan dialihkan ke kabupaten yang lain. Seperti yang tercantum pada pasal 16 huruf e dan h Undang-undang No.7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, sebagai Kepala Daerah Kabupaten trenggalek mempunyai kewajiban untuk memperhatikan masyarakat sekitarnya dan memenuhi kebutuhan dari masyarakat kabupaten trenggalek serta pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum rumah tangga dan pengembangan sistem penyediaan air minum menjadi tanggung jawab Pemerintah atau Pemerintah Daerah serta PDAM selaku Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang ditunjuk langsung oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan dalam mengembangkan sistem penyediaan air minum, hal ini sesuai dengan pasal 40 Undang-undang No.7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Untuk pembagian pembiayaan diatur dalam pasal 77, 78 ayat (1) dan (2) serta 79 ayat (2) Undang-undang No.7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.. Hubungan Hukum PT. Manggala dengan Ir. Suprpto yaitu sebagai direktur PDAM, PDAM adalah BUMN/BUMD yang merupakan penyelenggara pengembangan sistem penyediaan air minum, sehingga Ir.Suprpto sebagai direktur PDAM menjalankan wewenang dan tugasnyayang pada saat melakukan perjanjian pembuatan akses jalan angkut dan pasang pipa No.: 690/20/406.080/2007 No.: 43/MGL/TG/I/08. Perjanjian tersebut sah menurut hokum dan bersifat mengikat .Ir Suprpto setelah

pensiun dari PDAM, membuat pernyataan bahwa masih ada kekurangan pembayaran sebesar Rp. 516.395.000,00 kepada PT. Manggala, sehingga yang semula Ir Suprpto sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan wewenang dan melakukan perjanjian sudah sah secara hukum akan tetapi dengan adanya pernyataan maka hal tersebut menjadi tanggungjawab pribadi dari Ir Suprpto yang bukan lagi berkapasitas sebagai direktur PDAM atas perbuatan hukum Ir Suprpto.

Dari penjabaran analisis diatas, sudah seharusnya Hakim memutuskan apabila perjanjian kerjasama pembangunan jalan akses angkut dan pasang pipa No. 690/20/406.080/2007 No. 43/MGL/TG/I/08 antara PT. Manggala dengan Para Tergugat telah wanprestasi. Karena belum adanya pelunasan pembayaran dari para tergugat kepada PT Manggala. Dan untuk adanya keadilan dalam penggantian ganti rugi terhadap PT Manggala, maka Hakim seharusnya menghukum para Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng jika dilihat dari hubungan hukum para tergugat dengan penggugat. Sehingga jelas tidaklah tepat jika Ir Suprpto dan pihak SDA yang menanggung kekurangan tersebut.

## **F. Kesimpulan**

1. Perjanjian kerjasama pembangunan jalan akses angkut dan pasang pipa No. 690/20/406.080/2007 No. 43/MGL/TG/I/08 antara PT. Manggala dengan Para Tergugat yang diwakili oleh Ir Suprpto yang saat itu berkapasitas sebagai direktur PDAM sudah dilakukan sesuai tugas dan wewenang dan telah sah secara hukum akan tetapi dengan tidak dilunasinya kekurangan pembayaran sampai dengan tanggal jatuh tempo terhadap PT Manggala maka perjanjian tersebut menjadi wanprestasi.
2. Putusan Pengadilan Negeri Trenggalek No. 08/pdt.G/2012/PN.TL yang menetapkan atau menghukum Ir. Suprpto dan SDA untuk bertanggungjawab memenuhi kekurangan pembayaran terhadap PT. Manggala tidak tepat, hal ini dikarenakan para tergugat memiliki hubungan hukum kepada PT. Manggala , maka para tergugat harus dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara dan biaya kurang proyek yang belum dilunasi.